

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan nasional merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional. Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dan unit defisit. Bank memobilisasi dana yang telah dihimpunnya untuk diolah menjadi salah satu sumber penyaluran atau pembiayaan kredit sehingga dana tersebut lebih bernilai produktif.

Pemberian fasilitas kredit bagi perbankan merupakan tulang punggung dan menjadi salah satu fokus utama dalam kegiatan perbankan. Fungsi kredit bagi perbankan adalah menyalurkan dana yang telah dihimpun dari masyarakat agar tidak tercipta dana mengendap (*idle fund*). Selain itu, penyaluran kredit juga memberikan keuntungan bagi bank melalui selisih pemberian bunga kredit sehingga bank akan memiliki prosentase yang besar untuk memperoleh laba yang sebagian besar ditopang oleh pendapatan bunga bersih.

Data statistik perbankan Bank Indonesia (BI), pendapatan bunga bersih hingga Desember 2012 tumbuh mencapai Rp 207,55 triliun. Pendapatan bunga bersih ini tumbuh dibandingkan tahun

sebelumnya sebesar Rp 178,72 triliun¹. Tingginya profitabilitas perbankan tersebut sebagian besar berasal dari pendapatan operasional yang bersumber dari bunga kredit (70,96%) dengan pertumbuhan mencapai 14,05% (ytd) atau 23,66% (yoy)².

Penyaluran kredit bagi perbankan merupakan suatu kegiatan yang mempunyai manfaat seperti yang telah dijelaskan diatas, namun sayangnya kegiatan tersebut belum dilaksanakan secara optimal oleh perbankan. Kondisi tersebut diperkuat oleh pernyataan dari ekonom PT. Bank Mandiri Tbk, Destry Damayanti, menilai bahwa:

Pada tahun 2012, penetrasi perbankan Indonesia mengalami penurunan hingga 41 persen. Padahal, pada tahun sebelumnya mencapai 43 persen dan dari sisi penyaluran kredit kurang lebih masih di kisaran 35 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh lebih kecil dari Malaysia yang sudah mencapai 100 persen³.

Penetrasi perbankan yang cukup rendah kepada nasabah Indonesia menjadi salah satu penyebab penyaluran kredit Perbankan Indonesia belum optimal. Hal ini ditandai dengan turunnya pertumbuhan kredit perbankan pada tahun 2012 yaitu berkisar 21-22%. Padahal bank sentral memprediksi pertumbuhan kredit perbankan dan sesuai rencana bisnis bank (RBB) masih bisa tumbuh 22-24 persen⁴.

Rendahnya akses perbankan terutama dalam memberikan pelayanan perkreditan sebagian besar terjadi pada kaum menengah ke

¹ Daniel Rudolf. *Laba Bersih Bank Umum Tumbuh 23,665%* (metronews.com, 15 Februari 2013)

² Herdaru Purnomo. *BI: Banyak Ambil Untung dari Bunga, Untung Bank Naik 30%* (detikfinance, 19 Februari 2013)

³ *Ekonom: Perbankan Masih Sulit Jangkau Masyarakat Bawah*, (<http://viva.co.id>, diakses pada 20 April 2013, pukul 14.00 WIB)

⁴ Purwanto, *Dedik. Kredit Perbankan Tahun 2012 Turun*. (Kompas, 13 Februari 2013)

bawah. Hal tersebut kembali diperkuat oleh pernyataan Ekonom PT Bank Mandiri Tbk, Destry Damayanti, menilai bahwa:

Pertumbuhan industri perbankan yang pesat di Indonesia ternyata tidak dibarengi dengan akses layanan perbankan ke masyarakat. Kondisi itu membuat sektor keuangan di Indonesia mengalami keterbatasan dalam menjangkau masyarakat kelas bawah. Hal itu ditandai dengan masih terpusatnya perbankan di Pulau Jawa dengan 60%-70% industri perbankan berpusat di Jakarta⁵.

Upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah berusaha mendirikan bank-bank khusus yang dapat menjangkau masyarakat menengah ke bawah dan dapat menjangkau hingga wilayah tingkat kecamatan. Contoh dari bank khusus tersebut adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sebagaimana lembaga perbankan lainnya, melaksanakan fungsinya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Sejak adanya kebijakan deregulasi di sektor perbankan yang dilakukan pemerintah berupa Paket 27 Oktober 1988 atau yang lebih dikenal dengan Pakto 88, pertumbuhan perbankan di Indonesia sangat pesat. Isi dari Pakto 88 ini antara lain memberikan kemudahan untuk mendirikan bank baru baik swasta nasional, campuran, maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Kebijakan Pakto 88 melalui Keputusan Presiden RI No. 38 menjadi momentum awal pendirian Bank Perkreditan Rakyat baru.

⁵ *Ekonom: Perbankan Masih Sulit Jangkau Masyarakat Bawah, op.,cit.*

Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR)⁶. Oleh karena itu diharapkan BPR menjadi salah satu pendukung perkembangan perekonomian Indonesia, terutama untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat menengah ke bawah yang belum *bankable*.

BPR merupakan salah satu lembaga keuangan mikro dimana peran utamanya adalah menjadi mitra bagi pengusaha UMKM. Hal tersebut mengandung arti bahwa fokus pelayanan BPR lebih condong kepada pengusaha kecil yang berasal dari masyarakat menengah kebawah. Namun, peranan BPR lebih sempit dibandingkan dengan bank umum. Kegiatan BPR hanya meliputi penghimpunan dan penyaluran dana saja bahkan dalam menghimpun dana, BPR dilarang untuk menerima simpanan giro. Larangan lainnya bagi BPR adalah tidak diperkenankan ikut transaksi kliring serta transaksi valuta asing.

Keterbatasan peranan BPR dibandingkan dengan bank umum menjadikan penghimpunan dana dan penyaluran kredit sebagai kegiatan utamanya. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh BPR sebagian besar bersumber dari pendapatan bunga melalui kegiatan penyaluran kreditnya. Semakin banyak BPR menyalurkan dana kreditnya maka akan semakin banyak pula pendapatan yang didapat olehnya.

⁶ <http://www.bi.go.id/> diakses pada 25 Februari 2013, pukul 11.33 WIB

Peran BPR yang hanya berfokus kepada penghimpunan dan penyaluran dana ini ternyata tidak mudah. Fungsi intermediasi BPR sebagai bank mikro dalam penyaluran kredit dinilai belum optimal, meskipun trend penyaluran kredit tersebut cenderung naik. Kenaikan jumlah penyaluran kredit tersebut belum mampu memenuhi target dari Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) dan Rencana Bisnis Bank (RBB) BPR. Joko Suyanto, Ketua Umum Perbarindo targetkan penyaluran kredit BPR mencapai Rp 60 Triliun hingga akhir tahun 2012⁷. Namun pada prakteknya penyaluran kredit BPR hingga akhir tahun 2012 hanya mencapai 49,9 Triliun⁸.

Kondisi tersebut juga digambarkan oleh pertumbuhan kredit BPR yang kian mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan pada akhir tahun 2012 pertumbuhan kredit belum mampu mencapai target yang ditetapkan BI yakni 23%⁹. Hal tersebut dapat digambarkan oleh tabel dibawah ini.

Tabel I.1

Pertumbuhan Kredit BPR Konvensional Periode 2010-2012

Tahun	Jumlah Kredit (dalam ribuan rupiah)	Pertumbuhan Kredit (dalam persen)
2010	33.844.259.282	20,86
2011	41.099.515.666	21,43
2012	49.818.401.968	21,21

Sumber: Direktorat Kredit BPR UMKM (DKBU) BI

⁷ <http://www.carikredit.com/> (diakses pada 16 Maret 2013, pukul 21.54 WIB)

⁸ Statistik BPR, DKBU BI

⁹ <http://www.neraca.co.id/> (diakses pada 23 Maret 2013, pukul 10.58 WIB)

Tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah penyaluran kredit BPR semakin naik dari tahun ke tahun namun pertumbuhan kredit mengalami penurunan. Pertumbuhan kredit yang menurun dan belum mampu mencapai target tersebut mengindikasikan bahwa ekspansi kredit BPR belum optimal.

Fungsi perkreditan yang dilakukan BPR dinilai belum sepenuhnya optimal. Perannya sebagai lembaga keuangan mikro yang dekat dengan sektor kecil juga dinilai belum optimal. Hal tersebut terlihat pada tahun 2011 masih ada 50% UMKM yang belum tersentuh layanan perbankan, sedangkan penelitian Bank Dunia menyatakan 60% UMKM di Indonesia belum terakses layanan perbankan¹⁰.

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat fungsi intermediasi perbankan adalah tingkat *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 menyatakan bahwa LDR yang baik bagi suatu perbankan berkisar antara 78%-100%. Semakin tinggi LDR mengindikasikan bahwa dana pihak ketiga yang digunakan oleh pihak bank dalam menyalurkan kreditnya semakin besar. Namun, tingkat LDR BPR belum memenuhi ketentuan BI tersebut dan bahkan terus menurun, hal ini mengandung arti bahwa BPR harus lebih aktif dalam menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit. Data tingkat LDR BPR dapat ditunjukkan melalui tabel dibawah ini.

¹⁰ Yuli Ali. *Akselerasi UMKM*. (Kontan, 8 Juli 2011)

Tabel I.2
Tingkat LDR BPR Konvensional Periode 2010-2012

Tahun	LDR (dalam persen)	Pertumbuhan LDR (dalam persen)
2010	78,04	0.72
2011	77,57	0.6
2012	77,80	0.29

Sumber : DKBUI BI

Faktor lain yang mendorong jumlah penyaluran kredit adalah suku bunga pinjaman. Bank selaku kreditur yang mempunyai kelebihan dana yang dapat disalurkan dalam bentuk kredit akan mematok suku bunga pinjaman yang relatif tinggi agar mendapat pendapatan bunga yang lebih besar sehingga lebih menguntungkan bank. Namun disisi lain, debitur memandang tingkat suku bunga pinjaman sebagai beban tambahan yang harus dibayarkannya atas konsekuensi dari peminjaman uang yang dilakukannya sehingga jika tingkat suku bunga pinjaman dinilai cukup membebankan maka berdampak pada penurunan jumlah kredit yang mampu diserap oleh debitur tersebut.

Suku bunga pinjaman BPR secara umum masih berkisar pada rata-rata di atas 30%. Hal tersebut jika dibandingkan dengan bank umum masih relatif jauh. BPR belum bisa menetapkan suku bunga pinjaman yang mampu bersaing dekat dengan bank umum dikarenakan komponen pembentuk suku bunga BPR dan bank umum berbeda.

Pergerakan suku bunga pinjaman BPR dan jumlah kredit yang disalurkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3
Tingkat Suku Bunga Pinjaman dan Jumlah Penyaluran Kredit
Periode 2010-2012

Tahun	Tingkat Suku Bunga Pinjaman (dalam persen)	Jumlah Penyaluran Kredit (dalam ribuan rupiah)
2010	32,86	33.844.259.282
2011	33,29	41.099.515.666
2012	32,51	49.818.401.968

Sumber : DKBU BI

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2011 terdapat kenaikan tingkat suku bunga dan mengakibatkan jumlah penyaluran kredit meningkat cukup tinggi dan mengalami pertumbuhan sebesar 21, 43%. Pada tahun 2012 tingkat suku bunga kredit turun namun jumlah penyaluran kredit tetap naik tetapi kenaikan pertumbuhannya masih lebih kecil dari tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan kredit tahun 2012 yaitu sebesar 21,21%.

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2011 terjadinya kenaikan tingkat suku bunga kredit yang diikuti dengan peningkatan jumlah penyaluran kredit BPR mengindikasikan bahwa hal tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor penawaran dari sisi bank dimana pada tingkat suku bunga naik jumlah penyaluran kredit juga meningkat. Namun disisi lain, pada tahun 2012 penurunan tingkat suku bunga pinjaman juga mengakibatkan jumlah penyaluran kredit BPR

meningkat. Pada tahun 2012 tersebut mengandung arti bahwa tingkat suku bunga tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor permintaan dari sisi debitur sehingga semakin turun tingkat suku bunga mengakibatkan jumlah penyaluran kredit juga meningkat. Kedua hal tersebut memberikan maksud tersirat bahwa tingkat suku bunga pinjaman dipengaruhi oleh kedua faktor antara penawaran dari sisi bank dan permintaan dari sisi debitur.

Karakteristik bank sebagai lembaga penghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit maka diperlukan sumber dana terlebih dahulu untuk digunakan sebagai sumber penyaluran kredit. Salah satu sumber dana tersebut adalah deposito yang berasal dari masyarakat golongan surplus. Deposito merupakan salah satu sumber dana pihak ketiga (DPK) bagi BPR yang jumlahnya lebih banyak dari tabungan. Semakin besar DPK terutama jenis deposito maka semakin banyak jumlah kredit yang dapat disalurkan BPR kepada debiturnya.

Kegiatan penyaluran kredit oleh BPR lebih banyak menggunakan dana deposito dibandingkan tabungan disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, karena sumber dana deposito lebih mudah diprediksikan pengambilannya sehingga BPR mempunyai kesempatan untuk menggunakan dana tersebut dalam penyaluran kreditnya selama masa tenggang antara penghimpunan dan pengambilan. Kedua, deposito termasuk sumber dana mahal bagi perbankan karena untuk

menarik simpati deposan bank harus mematok suku bunga simpanan yang tinggi. Oleh karena itu, untuk mengembalikan dana tersebut maka BPR harus memutar dana deposito menjadi dana pinjaman yang siap diberikan kepada para debiturnya.

Data mengenai perbandingan jumlah deposito dan tabungan BPR serta jumlah penyerapan kredit dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4
Jumlah DPK dan Jumlah Penyaluran Kredit
Periode Tahun 2010-2012

Tahun	DPK (dalam ribuan rupiah)		Jumlah Penyaluran Kredit (dalam ribuan rupiah)
	Deposito	Tabungan	
2010	21.455.017.992	9.856.741.217	33.844.259.282
2011	26.174.279.692	12.035.146.905	41.099.515.666
2012	30.401.387.373	14.468.225.636	49.818.402.968

Sumber : DKBU BI

Tabel diatas menunjukkan kondisi yang cukup timpang antara sumber dana kredit dengan penyaluran kredit yang mengakibatkan timbulnya anggapan bahwa “lebih besar pasak daripada tiang”. Meskipun demikian tabel diatas juga menggambarkan bahwa kenaikan pada sumber dana baik itu deposito maupun tabungan akan meningkatkan jumlah penyaluran kredit yang diberikan oleh perbankan.

Faktor lain yang turut menyebabkan jumlah penyaluran kredit belum optimal adalah kinerja BPR yang belum baik yang tersermin dari rasio kredit macet atau *Non Performing Loan (NPL)*. BPR di Indonesia mempunyai tingkat prosentase kredit macet yang cukup tinggi. Batas ketetapan BI untuk tingkat NPL yaitu 5%. Semakin tinggi rasio tingkat kredit macet tersebut maka semakin sedikit jumlah kredit yang disalurkan oleh suatu bank. Secara nasional, tingkat NPL dan jumlah penyerapan kredit BPR dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 1.5
Tingkat NPL dan Jumlah Penyaluran Kredit
Periode Tahun 2010-2012

Tahun	Tingkat NPL (dalam persen)	Jumlah Penyaluran Kredit (dalam ribuan rupiah)
2010	6.12	33.844.259.282
2011	5.22	41.099.515.666
2012	4.75	49.818.402.968

Sumber : DKBU BI

Perilaku bank pada saat pada rasio kredit macet yang cukup tinggi maka bank akan lebih bersikap *risk averse* dan persepsi perbankan terhadap risiko kredit di sector dunia usaha tersebut menyebabkan bank mengurangi jumlah dana kredit dan menyebabkan penurunan jumlah kredit yang disalurkan kepada para debitur.

Berdasarkan penjelasan diatas terlihat bahwa peran intermediasi BPR di Indonesia sebagai lembaga pembiayaan mikro belum optimal. Hal tersebut digambarkan dari tingkat penyaluran kredit BPR yang belum mencapai target yang ditetapkan oleh

Perbarindo dan RBB serta tingkat LDR yang belum memenuhi ketentuan BI. Oleh karena itu, penyaluran kredit di BPR masih tergolong rendah.

Kegiatan penyaluran kredit BPR yang belum optimal mengakibatkan bank tersebut mengalami penurunan pendapatan bunga dimana bagi BPR pendapatan bunga merupakan pendapatan utama. Penurunan pendapatan tersebut mengakibatkan bank mengalami penurunan rasio kecukupan modal. Dampak dari rasio kecukupan modal yang rendah maka bank akan kesulitan menjalankan kewajibannya termasuk dalam hal pemeliharaan likuiditasnya sehingga dalam kondisi tersebut bank semakin rawan dalam menghadapi resiko likuidasi.

Berdasarkan permasalahan diatas, BPR sebagai lembaga pembiayaan mikro yang akrab dengan karakter pengusaha UMKM mempunyai tantangan yang lebih besar dalam menjalankan fungsi intermediasinya sekaligus memberikan sumbangan kredit untuk UMKM di Indonesia yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan bahwa jumlah penyaluran kredit BPR dapat disebabkan oleh :

1. Pengaruh tingkat rasio *loan to deposit ratio* (LDR) terhadap jumlah penyaluran kredit
2. Pengaruh tingkat suku bunga pinjaman terhadap jumlah penyaluran kredit
3. Pengaruh jumlah deposito terhadap jumlah penyaluran kredit
4. Pengaruh tingkat *non performing loan* (NPL) terhadap jumlah penyaluran kredit
5. Pengaruh tingkat suku bunga pinjaman dan jumlah deposito terhadap jumlah penyaluran kredit

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi diatas, ternyata bahwa jumlah penyaluran kredit BPR dipengaruhi oleh beberapa factor yang luas, maka dengan demikian penelitian ini dibatasi dengan permasalahan: “Pengaruh tingkat suku bunga pinjaman dan jumlah deposito terhadap jumlah penyaluran kredit BPR di Indonesia”

D. Perumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan sesuai dengan pembatasan masalah yang telah ditentukan adalah sebagai berikut: “Apakah variabel tingkat suku bunga pinjaman dan jumlah deposito berpengaruh terhadap jumlah penyaluran kredit?”

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini baik secara teoretis maupun empiris mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian dapat dijadikan landasan untuk menyusun konsep dan strategi baru dalam pengembangan analisis untuk mengatasi kurang optimalnya penyaluran kredit BPR

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada BI selaku bank sentral dan BPR di Indonesia mengenai opsi yang diperlukan untuk menanggulangi masalah penyaluran kredit BPR.